

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami perkembangan dalam penggunaan media komunikasi dan informasi. Hal ini berkaitan dengan data yang diperoleh dari lembaga riset pasar *e-Marketer* pada *Kompas.com*, yang mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang menempati peringkat ke-6 di dunia dalam penggunaan media komunikasi dan informasi yang berbasis internet terutama pada media sosial di tahun 2014 lalu hingga sekarang. Data ini menjadi bukti bahwa penduduk Indonesia di masing-masing provinsi sudah menggunakan internet, tidak terkecuali Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam *Suara.com* menegaskan jika penggunaan internetnya sudah mencapai 3,3 juta pengguna dari jumlah presentase keseluruhan provinsi di Indonesia (Kristiani 2021).

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT merupakan organisasi yang berperan sebagai pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi sehingga dapat menjadi pusat informasi bagi kebutuhan pemerintah, khususnya masyarakat pada umumnya. Sebagai lembaga yang berperan penting dalam pengelolaan sistem komunikasi dan informasi di Nusa Tenggara Timur, hal ini menjadi sebuah tanggung jawab besar bagi pemerintah Nusa Tenggara Timur untuk sepatutnya melakukan pengelolaan dana secara efektif dan efisien agar terus mengalami perkembangan yang dituangkan dalam sebuah bentuk laporan keuangan. Hal ini yang dijelaskan Erlina dkk. (2013) bahwa dalam pemerintahan

diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber keuangan daerah itu sendiri.

Menurut Daling (2013) Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran.

Belanja daerah merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Zebua (2014) belanja daerah yang teralokasikan secara tepat ke pos-pos belanja yang dibutuhkan oleh masyarakat akan mendorong pertumbuhan yang positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mahmudi (2010) analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan

anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi, efektifitas dan dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketentuannya terhadap peraturan perundang-undangan (Soetjipto 2011).

Penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan pertimbangan LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dinilai paling utama, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memberikan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas pengguna anggaran serta menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan pengguna sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilakukan secara efisien, efektif dan hemat, sesuai dengan APBD dan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah yang disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Nusa Tenggara Timur dari tahun 2017-2021, seperti pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika
Periode 2017-2021
(Dalam rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase	Selisih
2017	14.594.261.000,00	13.937.146.257,00	95,50%	657.114.743
2018	12.265.538.600,00	11.305.551.654,00	92,17%	959.986.946
2019	12.798.024.000,00	11.954.431.908,00	93,41%	843.592.092
2020	12.746.834.676,00	11.738.459.325,00	92,44%	1.008.374676
2021	11.945.941.274,00	11.500.715.877,00	96,27%	445.225.397

Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan tabel 1.1, kita dapat melihat anggaran, realisasi, persentase dan juga selisih belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika dari tahun 2017-2021.

Tahun 2017 menjadi tahun dengan anggaran paling besar pada lima tahun terakhir, dimana anggarannya sebesar Rp 14.594.261.000,00 dan realisasinya sebesar Rp 13.937.146.257,00 dengan persentase 95,50% sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp 657.114.743.

Tahun 2018 anggaran kembali turun sebesar Rp 12.265.538.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.305.551.654,00 dengan persentase 92,17% dan selisihnya sebesar Rp 959.986.946. Pada tahun 2019 selisih anggaran dan realisasinya sebesar Rp 843.592.092

Tahun 2020 menunjukkan anggaran sebesar Rp 12.746.834.676,00 dan realisasi belanja sebesar Rp 11.738.459.325,00 dengan persentase 92,44% dan selisihnya sebesar Rp 963.375.351, yang merupakan selisih paling besar dari lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 selisih anggaran dan realisasinya sebesar Rp 445.225.397. Jumlah anggaran yang tidak terealisasi dilihat dari persentasenya cukup besar dan nominalnya yang cukup signifikan. Dalam menentukan anggaran belanja, hendaknya memperhatikan penghematan yang dilakukan berdasarkan angka persentase dan juga nominalnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kinerja Belanja Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Nusa Tenggara Timur**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka adapun rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017-2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana keseimbangan belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan perbandingan antara realisasi belanja modal dengan total belanja daerah?
3. Bagaimana tingkat efisiensi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017-2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui keseimbangan belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan perbandingan antara realisasi belanja modal dengan total belanja.
3. Untuk mengetahui tingkat efisiensi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan Kinerja Belanja Daerah.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan terutama dalam pembahasan mengenai kinerja belanja daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Nusa Tenggara Timur, serta dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian dan bahan kepustakaan atau sumber pengetahuan bagi masyarakat luas pada umumnya.